

**Tinjauan Tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi  
di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota  
Kota Samarinda**

**Nurhayatun**

**eJournal Administrasi Negara  
Volume 1, Nomor 3, 2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Tinjauan Tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda

Pengarang : Nurhayatun

NIM : 0802015106

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

**Pembimbing I,**

Samarinda, 14 September 2013  
**Pembimbing II,**

**Prof.Dr.Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si**  
**NIP. 19590308 198403 2 001**

**Dr. Anthonius Margono, M.Si**  
**NIP.19561202 198103 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH PROGRAM STUDI**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Negara	<b>KETUA PROGAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA</b>  <b>Drs. M. Z. Arifin, M.Si</b> <b>NIP. 19570606 198203 1 025</b>
<b>Volume</b> : 1	
<b>Nomor</b> : 3	
<b>Tahun</b> : 2013	
<b>Halaman</b> : 1118 - 1132	

## **Tinjauan Tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dari Aspek Ekonomi Di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda**

**Nurhayatun®**

### ***Ringkasan***

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program-program Ekonomi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Program-program Ekonomi pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi langsung di lapangan, dan wawancara dengan informan serta dokumentasi. Adapun penentuan informan adalah menggunakan *Purposive Sampling*.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dari aspek ekonomi di Kelurahan Karang Mumus, mencakup Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di bidang aspek ekonomi, Tahapan-tahapan dibidang Aspek Ekonomi dalam proses Pinjaman Dana Bergulir dan Kegiatan Ekonomi Produktif, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Kegiatan Ekonomi Bergulir dan Kegiatan Ekonomi Produktif sudah cukup baik walaupun didalam proses pemberdayaan masih terdapat faktor penghambat yaitu adanya sebagian KSM yang terlambat dan tidak mengembalikan dana bergulir mengakibatkan dana bergulir menjadi terhambat dan macet, hal tersebut membuat pelaksanaan program dana bergulir menjadi kurang efektif. Adapun hambatan lain yang dihadapi yaitu pada kegiatan ekonomi produktif masih ada sebagian KSM yang tidak ikut berpartisipasi.

***Kata Kunci*** : *Pelaksanaan PNPM MP, Aspek Ekonomi, Kelurahan Karang Mumus.*

®Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : [nurhayatun@yahoo.co.id](mailto:nurhayatun@yahoo.co.id)

## **Pendahuluan**

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui beberapa pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan cenderung parsial dan tidak berkelanjutan, efektifitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Maka mencermati dari situasi sosial tersebut pemerintah mengeluarkan rencana melalui kebijaksanaan publik yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu pemerintah membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui program tersebut, diharapkan pada gilirannya dapat tercipta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Program PNPM-Mandiri yang diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 april 2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengah, sesungguhnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara efektif dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada diberbagai kementerian/lembaga.

Program PNPM Mandiri mempunyai cakupan pembangunan yang luas hingga daerah-daerah terpencil dan terisolir. PNPM-Mandiri diharapkan dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam proses rencana PNPM mandiri yang membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. PNPM Mandiri sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program itu sendiri.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007 termasuk di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda yang dalam pelaksanaannya berdasarkan konsep TRIDAYA yaitu Aspek Sosial, Aspek Ekonomi dan Aspek Lingkungan yang di dalamnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perkotaan.

Khusus dibidang aspek ekonomi di dalam PNPM Mandiri Perkotaan itu sendiri merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dimana program kegiatannya ada dua yaitu pertama ekonomi bergulir / pinjaman bergulir, dikatakan bergulir karena dana untuk pinjaman ini terbatas. Karenanya, pemberian pinjaman oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diberikan bergantian sesuai dengan ketersediaan dana. Pembayaran kembali pinjaman merupakan syarat utama keberlangsungan pelayanan pinjaman. Kedua, ekonomi produktif yaitu kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Manfaat dari pelatihan tersebut dapat memberikan penghasilan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Dalam implementasinya PNPM Mandiri pada bidang ekonomi menuntut partisipasi dan kesadaran masyarakat atau pihak KSM dengan ikut serta dalam berbagai kegiatan pelatihan keterampilan dan bertanggungjawab dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir yang telah dipinjamkan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) kepada pihak KSM untuk digunakan sebagai modal kegiatan usaha yang jangka pengembalian angsurannya setiap bulan. Oleh karena itu, bila dalam suatu kelurahan tidak adanya partisipasi dalam mengikuti pelatihan keterampilan dan tanggungjawab masyarakat dalam mengembalikan pinjaman bergulir dipastikan program PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dibidang aspek ekonomi tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kelurahan Karang Mumus, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi. Hal itu diidentifikasi dari sering terlambatnya sebagian KSM dalam kegiatan dana bergulir mengangsur pinjaman serta tidak adanya pengembalian pinjaman yang telah diberikan sehingga membuat macetnya kegiatan pinjaman dana bergulir di Kelurahan Karang Mumus dan ada sebagian KSM Ekonomi yang tidak ikut berpartisipasi dikarenakan pekerjaan diluar yang tidak memungkinkan untuk bisa berpartisipasi sehingga pemberdayaan dibidang ekonomi produktif menjadi tidak menyeluruh.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda”.

### ***Perumusan Masalah***

1. Bagaimana Pelaksanaan Program-program Ekonomi dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam melaksanakan Program-program Ekonomi pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan program-program ekonomi dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program ekonomi pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda.

### ***Kegunaan Penelitian***

1. Secara Teoritis, sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengamatan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dari peneliti sesuai dengan ketentuan penulisan Karya Ilmiah di Universitas Mulawarman. Serta dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan, khususnya pengetahuan yang terkait dengan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi.
2. Secara Praktis, untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama di bangku perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama mengenai pembuatan karya ilmiah.

### ***Kerangka Dasar Teori***

#### ***Kebijakan Publik***

Friedrick (dalam islamy 2007: 17) “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Lasswell dan Kaplan (dalam islamy 2007: 15) “kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”.

#### ***Kemiskinan***

Ritonga (2003: 1) mendefinisikan bahwa “kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya”.

Pendapat lain menurut Salim (dalam Suyanto dan Karnaji, 2005: 1) mendefinisikan “kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok”.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Suhendra (2006: 74) “pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi”.

Sulistiyani (2004: 79) juga memberikan pengertian bahwa “pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya”

### ***Partisipasi Masyarakat***

Pendapat Slamet (dalam Suryono, 2001: 124) mengemukakan “partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikutsertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”.

Kemudian Kaho (2003: 127-130) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan
3. Partisipasi Dalam Memanfaatkan Hasil
4. Partisipasi Dalam Evaluasi

### ***Pelayanan Publik***

Kurniawan (dalam Pasalong 2008: 128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Moenir (2008: 12) “timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang, yang orang lain itu tidak kepentingan langsung atas sesuatu yang dilakukannya, merupakan suatu hal yang perlu dikaji tersendiri dari segi kemanusiaan”.

### ***Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri***

Berdasarkan (Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007:11) PNPM Mandiri adalah program nasional pengentasan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian PNPM Mandiri yang terkandung sebagai berikut.

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk

---

Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi (Nurhayatun)  
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkesinambungan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

### ***Kategori Program***

Berdasarkan (Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007:17) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat terdiri dari 2 kategori yakni sebagai berikut :

1. PNPM Inti yaitu program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan ada 4 (empat) program pokok PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu:
  - 1) PNPM Mandiri Perdesaan, merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilaksanakan sejak 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
  - 2) PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan dilaksanakan sejak 1999 sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara berkelanjutan.
  - 3) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan.

- 4) PNPM Mandiri DTK (Daerah Tertinggal dan Khusus), merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari program P2DTK (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus ini diberikan pada daerah-daerah tertinggal yang mengalami konflik sosial dan bencana alam.
2. PNPM Penguatan yaitu program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu.

### ***Prinsip – Prinsip PNPM Mandiri***

Berdasarkan (Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 2009: 8). Dalam pelaksanaannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan berdasarkan prinsip-prinsip dasar, antara lain:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia
2. Berorientasi pada masyarakat miskin
3. Partisipasi
4. Otonomi
5. Desentralisasi
6. Kesetaraan dan Kesamaan Gender
7. Demokratis
8. Transparansi dan Akuntabel
9. Prioritas
10. Kolaborasi
11. Keberlanjutan
12. Kesederhanaan

Dalam pelaksanaannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda berdasarkan konsep Tridaya yaitu:

1. Aspek Sosial bertujuan meningkatkan modal sosial agar tercipta masyarakat efektif meliputi :
  - 1) Memberikan santunan beasiswa kepada anak sekolah yang tidak mampu.
  - 2) Memberikan santunan cacat, santunan untuk janda/duda, dan santunan lansia/jompo kepada masyarakat yang tidak mampu di kelurahan tersebut.

2. Aspek Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi agar tercipta masyarakat lokal yang produktif meliputi :
  - 1) Mengadakan pelatihan untuk masyarakat diantaranya keterampilan komputer, menjahit, pembuatan kue dan berbagai pelatihan keterampilan lainnya.
  - 2) Mengadakan dana bergulir untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yaitu memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat tidak mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.
3. Aspek Lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan agar tercipta lingkungan yang lestari meliputi : Perbaikan infrastruktur kelurahan diantaranya, Perbaikan jalan yang rusak, semenisasi gang, pembuatan parit, dan perbaikan jembatan.

### ***Definisi Konseptual***

Definisi Konseptual merupakan tahapan memberikan batasan mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian skripsi ini maka definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah suatu pelaksanaan program nasional berbasis pemberdayaan masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dengan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan sehingga tercipta peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan di wilayah perkotaan secara berkelanjutan.
2. Aspek Ekonomi dalam PNPM Mandiri adalah salah satu bagian dari pelaksanaan aspek tridaya yang program pemberdayaannya meliputi ekonomi bergulir dan ekonomi produktif dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga tercipta masyarakat lokal yang produktif.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

#### ***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah terletak di wilayah Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

#### ***Fokus Penelitian***

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di bidang aspek ekonomi.
2. Tahapan-tahapan di bidang aspek ekonomi dalam proses:
  - a. Pinjaman Dana Bergulir.
  - b. Kegiatan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan).
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti:
  - a. Kegiatan Pinjaman Bergulir.
  - b. Kegiatan Ekonomi Produktif (pelatihan keterampilan).
4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi.

### ***Sumber Data***

1. Data primer :
  - a. Data hasil wawancara
  - b. Data dokumentasi penelitian, berupa foto-foto pelaksanaan penelitian.
2. Data sekunder :

Monografi atau profil Kelurahan Karang Mumus, Struktur organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), buku-buku pedoman PNPM Mandiri Perkotaan dan buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* yakni Sekretaris Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Al-Huda. Sedangkan yang menjadi *informan*, Fasilitator Kelurahan (Faskel), Unit Pengelola Keuangan (UPK), dan 15 orang masyarakat miskin penerima manfaat di sekitar Kelurahan Karang Mumus.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
  - a. Observasi
  - b. Wawancara
  - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

### ***Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 15-20):

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*)

### ***Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi***

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Karang Mumus, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi di Kelurahan Karang Mumus terlebih

dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat diminta untuk menjadi relawan dalam pendataan warga miskin disekitarnya kemudian dibentuk kelembagaan dimasyarakat, yang disebut dengan LKM, salah satu gugus LKM yaitu UPK yang bertugas mengelola kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi yang di usulkan oleh masyarakat di kelurahan karang mumus terdiri dari Pinjaman Dana Bergulir dan Kegiatan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan). Kegiatan pinjaman bergulir dan pelatihan keterampilan akan diberikan kepada masyarakat setelah masyarakat membentuk kelompok yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan anggota minimal 5 orang dan maksimal 15 orang dan didalam kelompok tersebut minimal 30% nya adalah wanita.

### ***Tahapan-Tahapan dibidang Ekonomi***

#### ***a. Pinjaman Dana Bergulir***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Karang Mumus ada beberapa tahapan-tahapan dalam pelayanan pemberian pinjaman dana bergulir yaitu Tahap Pengajuan Pinjaman, Tahap Pemeriksaan Pinjaman, Tahap Putusan (Persetujuan/Penolakan) Pinjaman, Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman, Tahap Pembinaan Pinjaman, dan Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman. Tahapan-tahapan tersebut sudah dijalankan dengan cukup baik, hal ini dilihat dalam hal pelayanan yang diberikan oleh pihak UPK yang sudah dilaksanakan sesuai dengan proses atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir. Persyaratan meminjam cukup membawa fotocopy KK dan KTP serta mengisi blanko yang telah disediakan, sudah bisa mendapatkan pinjaman tentunya dengan syarat yang telah diajukan oleh UPK pada saat proses peminjaman. Pelayanan yang diberikan oleh UPK dalam hal pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha dari modal yang telah dipinjamkan dan bisa menambah modal bagi masyarakat yang kekurangan modal untuk usaha yang sudah berjalan.

#### ***b. Kegiatan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan)***

Dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan ada beberapa tahapan yang harus dijalankan. Tahap pertama masyarakat membentuk kelompok KSM yang sesuai dengan usulan yang diajukan, kemudian KSM tersebut harus membuat proposal yang diberikan ke UPK, kemudian UPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar memberikan pelatihan kepada masyarakat. Pihak-pihak tersebut adalah LPK (Lembaga Pelatihan

Khusus) untuk pelatihan mengemudi, tempat untuk kegiatan menjahit lengkap dengan mesin jahit, dan tempat untuk kegiatan memasak lengkap dengan bahan

dan alat memasak yang masing-masing sudah menyiapkan pengajar, kemudian tahapan selanjutnya yaitu pendanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

***Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir dan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan).***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui partisipasi masyarakat Kelurahan Karang Mumus dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dibidang aspek ekonomi cukup baik hal ini dilihat pada saat sosialisasi dan proses penetapan usulan hingga pada saat pelaksanaan dengan jumlah peminjam dana bergulir dan peserta pelatihan keterampilan cukup banyak. Hal ini memberikan awal yang sangat baik dalam proses pelaksanaan program PNPM-MP melihat masyarakat sangat mendukung dengan diadakannya program yang berguna bagi masyarakat miskin itu sendiri. Walaupun selama pemberdayaan ada sebagian dari masyarakat yang jarang hadir disebabkan waktu yang diadakan untuk pertemuan ataupun pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan kegiatan dan pekerjaan mereka namun hal tersebut tidak mengurangi antusias masyarakat untuk mengikuti program tersebut .

***Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi.***

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi yaitu pada program pinjaman bergulir yang tidak berjalan dengan baik atau macet disebabkan adanya sebagian dari masyarakat yang kurang bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembalikan pinjaman bergulir tersebut ataupun terlambat dalam mengembalikan dana bergulir. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dana bergulir adalah dana hibah sehingga menurut sebagian masyarakat tersebut dana itu tidak perlu dikembalikan lagi padahal fasilitator kelurahan sudah mengadakan sosialisasi awal serta penjelasan saat peminjaman oleh UPK sehingga dana bergulir yang akan dipinjamkan ke KSM berikutnya menjadi terhambat.

Selain itu adapun hambatan yang ditemui dibidang pelatihan keterampilan yaitu adanya sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan disebabkan jadwal dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan dan disepakati terkendala waktu, yaitu berbenturan dengan waktu bekerja dan kegiatan mereka di luar sehingga

Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi (Nurhayatun)  
pelayanan dari diadakannya pelatihan kepada warga penerima manfaat tidak menyeluruh.

### ***Penutup***

Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi di Kelurahan Karang Mumus

dibentuk organisasi pelaksana yang terdiri dari: Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Organisasi Pelaksana tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan optimal, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat pada aspek ekonomi dimulai dari proses awal sosialisasi hingga sampai pada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan dibidang ekonomi kegiatannya meliputi Pinjaman Dana Bergulir dan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan) hal ini sudah sesuai dengan usulan dari masyarakat di Kelurahan Karang Mumus.

Tahapan-tahapan dibidang Aspek Ekonomi dalam Proses:

a. Pinjaman Dana Bergulir

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir cukup sederhana sehingga banyak dari masyarakat miskin yang membentuk kelompok agar bisa meminjam dana tersebut untuk modal usaha yang akan dijalankan dan modal untuk usaha yang sudah berjalan, dalam hal ini tahapan-tahapan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman teknis kegiatan pinjaman bergulir. Manfaat yang dirasakan oleh sebagian masyarakat yang telah berhasil memanfaatkan dana bergulir salah satunya adalah masyarakat yang mempunyai usaha kecil dengan hanya berjalan makanan ringan untuk anak-anak sekarang sudah mulai berkembang dengan berjualan kebutuhan rumah tangga.

b. Kegiatan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan).

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan sudah dilaksanakan dan dikelola dengan maksimal oleh LKM dan UPK, mulai dari pendataan masyarakat miskin, penetapan usulan, pembentukan kelompok, pendanaan hingga pada tahap pelaksanaan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang sopir setelah diberikan pelatihan mengemudi, selain itu membuka usaha penjahitan setelah mengikuti pelatihan menjahit.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti kegiatan Dana Bergulir dan Pelatihan Keterampilan. Dalam pelaksanaan program ekonomi yang terdiri dari dana bergulir dan pelatihan keterampilan, untuk tingkat partisipasi masyarakat cukup baik hal ini dilihat dari keterlibatan masyarakat yang hadir saat sosialisasi, saat proses penetapan usulan hingga saat pelaksanaan kegiatan dengan jumlah yang cukup banyak namun seiring berjalannya kegiatan tersebut

ada sebagian dari masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan pekerjaan sehari-hari namun hal ini tidak mengurangi antusias masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPMM Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi terdapat pada kegiatan pinjaman dana bergulir yaitu adanya sebagian KSM Ekonomi yang terlambat dalam mengangsur dan tidak mengembalikan dana bergulir yang telah dipinjam sehingga menghambat KSM Ekonomi lainnya untuk melakukan pinjaman dalam menjalankan usaha mereka, sehingga untuk pemberdayaan dibidang ekonomi bergulir dapat dikatakan kurang efektif, adapun faktor penghambat dibidang ekonomi produktif yaitu ada sebagian KSM Ekonomi yang tidak ikut berpartisipasi dikarenakan pekerjaan dan kegiatan diluar yang tidak memungkinkan untuk bisa berpartisipasi sehingga pemberdayaan dibidang ekonomi produktif tidak menyeluruh.

Setelah melalui beberapa macam tahap-tahap penelitian dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda, maka penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, adapun saran yang penulis perlu kemukakan adalah sebagai berikut:

Seyogyanya penjelasan yang diberikan oleh UPK harus benar-benar jelas dan dimengerti dan selalu diingatkan 2 atau 3 hari sebelum tanggal pengangsuran serta sebaiknya dilakukan pengawasan selama proses peminjaman agar masyarakat memiliki kesadaran dan menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman.

Bagi anggota KSM yang terlambat mengangsur sebaiknya diberikan peneguran secara kekeluargaan oleh Ketua RT dan jika masih terlambat diberikan surat peringatan dan sanksi yang tegas yakni dilaporkan ke Badan Pembina Masyarakat (Babinmas) yang ada disetiap kelurahan agar masyarakat bisa lebih bertanggungjawab atas pinjaman yang telah diberikan.

Seyogyanya jadwal-jadwal kegiatan PNPMM Mandiri Perkotaan khususnya di bidang ekonomi produktif disesuaikan dengan pekerjaan sehari-hari masyarakat agar tidak terjadinya benturan waktu sehingga pelatihan yang diberikan menjadi menyeluruh.

Sebaiknya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Fasilitator Kelurahan dalam upaya pemberdayaan dibidang pelatihan keterampilan selalu mengajak masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi aktif agar hasil pembangunan dapat berjalan dengan baik.

**Daftar Pustaka**

- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Belantika. Jakarta.
- Miles, B Matthew & A.Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H.A.S, DRS, 2008. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pabundu, Tika. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Pasalong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Patton, Andri. 2005. *Peran Informal Leader dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Ritonga, Hamonangan. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*. Badan pusat Statistik, Jakarta.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit CV. Haji Masagung,
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan isu pembangunan*, UN Press, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Suyanto, Bagong & Karnaji. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak kepada Rakyat Miskin*. Penerbit Airlangga University. Press. Surabaya. 2005.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Penerbit Medpress.

**Dokumen-dokumen:**

- Amandemen Undang-Undang 1945, 2002*. Yogyakarta: Media Presindo
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*.

*Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).*

*Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

*Pedoman Umum Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.* 2007. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.

*Konsep Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.* 2008. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.

*Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.* 2009. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.